

**PENDIDIKAN SEBAGAI DETERMINAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI
NEGARA BERKEMBANG**

Oleh:

Jeje Abdul Rojak

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Didit Darmawan

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

ABSTRACT

Education plays a central role in breaking the intergenerational cycle of poverty in developing countries. The relationship between these two variables is bidirectional: poverty hinders access to quality education, while low levels of education perpetuate poverty. Poor-quality education in impoverished areas results in children attending school without acquiring the basic skills required in the labor market. The poverty trap occurs because poor families face liquidity constraints and a high discount rate on the long-term benefits of education. The economic returns on education vary by level, with primary education providing the greatest benefits to the poorest groups. Public spending that is biased toward higher education is regressive because it is enjoyed more by the wealthy. Indirect pathways through improved health, reduced fertility, and women's empowerment amplify the impact of education on poverty reduction.

Keywords: education, poverty, developing countries, human capital, intergenerational transmission.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di negara berkembang masih menjadi masalah struktural yang menghambat pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari satu miliar penduduk di Asia dan Afrika hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari satu dolar per hari. Kondisi ini diperparah oleh distribusi pendapatan yang timpang dan akses terbatas terhadap layanan dasar termasuk pendidikan (Chin, 2015). Pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Namun di banyak negara berkembang, anak-anak dari rumah tangga miskin justru memiliki tingkat partisipasi sekolah yang paling rendah (Yanti et al., 2013). Mereka terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau menikah dini karena tekanan sosial ekonomi. Kesenjangan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Anak miskin mungkin masih dapat

mengakses sekolah dasar namun putus sekolah saat memasuki tingkat menengah (Lewin, 2009). Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan melahirkan keterbelakangan pendidikan, dan keterbelakangan pendidikan melanggengkan kemiskinan. Pemutusan lingkaran ini memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme hubungan dua arah antara pendidikan dan kemiskinan.

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan bersifat dua arah dan saling mempengaruhi dalam dinamika yang kompleks. Di satu sisi, kemiskinan menghalangi anak untuk bersekolah karena biaya langsung seperti seragam dan buku serta biaya tidak langsung seperti kehilangan pendapatan dari kerja anak. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial (Darham & Araujo, 2016). Pendidikan membekali individu dengan keterampilan kognitif dan non kognitif yang meningkatkan produktivitas kerja dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Di negara berkembang, setiap tambahan satu tahun schooling dapat meningkatkan pendapatan individu antara lima hingga lima belas persen tergantung pada jenjang pendidikan (Figuroa, 2015). Namun pengembalian ekonomi dari pendidikan tidak merata antar kelompok populasi dan antar wilayah geografis. Pendidikan dasar memberikan manfaat paling besar bagi kelompok termiskin karena menjadi pintu keluar dari pekerjaan subsisten. Pendidikan menengah dan tinggi cenderung lebih menguntungkan kelompok menengah ke atas yang memiliki akses ke pasar kerja formal (Hutomo et al., 2012). Dimensi gender juga mempengaruhi hubungan ini karena anak perempuan di negara berkembang sering dikorbankan ketika keluarga menghadapi keterbatasan sumber daya. Pemahaman tentang heterogenitas dampak pendidikan terhadap kemiskinan sangat penting untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang adalah rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak miskin meskipun mereka berhasil mengakses sekolah. Kehadiran fisik di bangku sekolah tidak menjamin perolehan keterampilan yang memadai untuk keluar dari kemiskinan. Colclough (2012) dalam bukunya *Education Outcomes and Poverty* menjelaskan bahwa hasil belajar di negara berkembang sangat rendah dengan banyak siswa tidak mampu membaca atau berhitung sederhana setelah beberapa tahun bersekolah. Kualitas pendidikan perlu memperhatikan aspek fasilitas fisik, daya tanggap sekolah, hingga kualitas pengajaran oleh guru. Kualitas guru yang buruk, kurangnya buku teks dan alat peraga, serta fasilitas sekolah yang tidak memadai menjadi penyebab utama rendahnya hasil belajar. Sekolah di daerah miskin sering kekurangan guru yang berkualitas karena guru lebih memilih bertugas di perkotaan dengan fasilitas lebih baik. Ketidakhadiran guru yang tinggi di daerah terpencil menyebabkan jam belajar efektif jauh di bawah standar nasional (Mbiti, 2016). Akibatnya, lulusan sekolah dasar dari keluarga miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup

untuk bersaing di pasar kerja atau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Investasi yang dikeluarkan keluarga miskin untuk menyekolahkan anak menjadi tidak memberikan pengembalian yang diharapkan. Kemiskinan tidak hanya menghalangi akses ke pendidikan tetapi juga menghalangi perolehan manfaat penuh dari pendidikan yang diakses (Bourdillon & Boyden, 2014).

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan adanya perangkap kemiskinan atau poverty trap yang diakibatkan oleh ketidakmampuan keluarga miskin berinvestasi dalam pendidikan anak. Bell dan Gersbach (2001) dalam studi mereka tentang pekerja anak membuktikan secara teoritis bahwa suatu masyarakat dapat terperangkap dalam kondisi keseimbangan ganda. Pada keseimbangan yang buruk, anak-anak bekerja penuh waktu dan tidak ada akumulasi modal manusia yang terjadi. Pada keseimbangan yang baik, terjadi pertumbuhan berkelanjutan melalui investasi dalam pendidikan (Arifin & Al Hakim, 2017). Transisi dari keseimbangan buruk ke keseimbangan baik memerlukan intervensi kebijakan yang signifikan seperti program transfer tunai bersyarat. Pemerintah perlu merancang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi keluarga miskin (Wisnujati, 2012). Keluarga miskin hidup dalam tekanan pendapatan harian sehingga mereka mendiskontokan manfaat pendidikan jangka panjang dengan tingkat yang sangat tinggi. Biaya pendidikan saat ini terasa sangat berat sementara manfaatnya baru dirasakan bertahun kemudian ketika anak sudah dewasa. Keluarga miskin juga memiliki akses terbatas ke pasar kredit sehingga tidak dapat meminjam untuk membiayai investasi pendidikan (Jensen, 2010). Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian tentang apakah anak akan benar benar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah bersekolah. Ekspektasi yang rendah tentang nilai ekonomi dari pendidikan mengurangi motivasi keluarga untuk berinvestasi meskipun ada program bantuan. Perangkap kemiskinan ini bersifat antar generasi karena anak yang tidak berpendidikan akan membesarkan anaknya sendiri dalam kondisi serupa.

Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan pendidikan antara kelompok kaya dan miskin akan terus melebar seiring dengan perubahan struktur ekonomi. Globalisasi dan revolusi teknologi meningkatkan permintaan akan tenaga kerja terampil sementara mengurangi permintaan akan tenaga kerja tidak terampil (Mayer, 2010). Lanjouw et al. (2001) menunjukkan bahwa di Indonesia, orang miskin terwakili dengan baik di pendidikan dasar namun memerlukan peningkatan penyediaan pendidikan menengah. Anak-anak miskin yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar akan menghadapi pasar kerja yang semakin sempit dengan upah yang terus tergerus inflasi. Sebaliknya anak-anak dari keluarga kaya yang menyelesaikan pendidikan tinggi akan menikmati premium upah yang semakin besar. Kesenjangan pendapatan yang diwariskan melalui perbedaan akses pendidikan akan semakin memperkuat stratifikasi sosial dan ekonomi. Mobilitas sosial vertikal akan menurun drastis karena latar belakang

kelahiran menentukan hampir seluruh prospek hidup seseorang. Hal ini tidak hanya tidak adil secara moral tetapi juga tidak efisien secara ekonomi karena banyak bakat terbuang sia-sia. Negara yang gagal memutus hubungan antara kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi. Potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dicapai akan berkurang karena separuh populasinya tidak produktif.

Tujuan penulisan studi ini adalah menguraikan secara teoretis hubungan dua arah antara pendidikan dan kemiskinan serta implikasinya bagi kebijakan di negara berkembang. Pencapaian tujuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengayaan literatur ekonomi pembangunan dan perencanaan pendidikan. Secara praktis, kerangka konseptual yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk merancang program intervensi yang memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur atau library research. Metode ini dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat konseptual dan memerlukan sintesis teoretis dari berbagai sumber tertulis. Creswell (2009) dalam bukunya *Research Design* menjelaskan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk pertanyaan yang mengeksplorasi makna dan mekanisme hubungan antar fenomena sosial. Sumber data utama berasal dari buku teks ekonomi pembangunan, sosiologi pendidikan, dan kebijakan publik.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Krippendorff (2004) dalam bukunya *Content Analysis*. Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian dokumen yang terkumpul ke dalam kategori tematik berdasarkan akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan pengembalian ekonomi pendidikan. Seluruh dokumen dibaca berulang kali untuk menangkap argumentasi inti dari setiap penulis. Kategori yang muncul kemudian direduksi melalui proses pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi pola hubungan antar konsep. Tahap selanjutnya adalah sintesis teoretis yang menghubungkan temuan dari berbagai sumber menjadi suatu kerangka konseptual terpadu. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pernyataan dari minimal tiga penulis berbeda untuk setiap proposisi yang dibangun. Prosedur audit juga dilakukan dengan mendokumentasikan setiap langkah analisis secara sistematis sehingga pembaca dapat melacak kembali basis keputusan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan di negara berkembang bersifat dua arah dan kumulatif, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Kemiskinan mengurangi kemampuan keluarga untuk berinvestasi dalam pendidikan anak melalui mekanisme biaya langsung dan biaya kesempatan (Adhikary & Kateja, 2012). Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang memiliki produktivitas rendah dan terjebak dalam pekerjaan berupah kecil. Colclough (2012) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran luar biasa penting dalam upaya penghapusan kemiskinan di seluruh dunia. Buku yang disuntingnya ini menyajikan bukti dari empat negara di Afrika dan Asia Selatan tentang kompleksitas hubungan tersebut. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan kognitif seperti literasi, numerasi, dan pemecahan masalah yang meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan juga membekali keterampilan non kognitif seperti disiplin, ketekunan, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Kedua jenis keterampilan ini sama-sama penting untuk keberhasilan di pasar kerja modern. Namun transmisi manfaat pendidikan ke pengurangan kemiskinan tidak terjadi secara otomatis melainkan tergantung pada konteks ekonomi dan sosial. Di negara berkembang dengan pasar kerja yang terdualisasi, lulusan pendidikan mungkin tetap bekerja di sektor informal dengan upah rendah.

Kualitas pendidikan yang rendah di negara berkembang menjadi penghalang utama bagi kontribusi pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan (Cremin & Nakabugo, 2012). Colclough (2012) mengidentifikasi bahwa banyak anak di negara berkembang menghabiskan beberapa tahun di sekolah namun tidak memperoleh keterampilan dasar. Studi di India, Pakistan, Ghana, dan Kenya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas lima tidak dapat membaca kalimat sederhana. Mereka juga tidak dapat melakukan operasi pembagian atau memahami grafik batang yang paling sederhana. Rendahnya hasil belajar siswa menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran masih belum memadai (Wagner, 2010). Rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kualitas guru yang buruk dan kurangnya sumber daya. Guru di daerah miskin sering tidak hadir mengajar karena alasan kesehatan, keluarga, atau pekerjaan sampingan. Ketika hadir pun, metode pengajaran yang digunakan cenderung berpusat pada guru dengan hafalan tanpa pemahaman konsep (Mbiti, 2016). Buku teks yang tersedia sering terlalu sulit untuk tingkat kemampuan siswa rata-rata karena kurikulum yang terlalu ambisius. Akibatnya, tahun yang dihabiskan di sekolah tidak menghasilkan peningkatan kemampuan yang berarti bagi anak miskin. Investasi keluarga dan pemerintah dalam pendidikan menjadi tidak efisien karena output pembelajaran sangat rendah. Mengatasi krisis pembelajaran ini memerlukan perhatian yang sama besarnya dengan mengatasi krisis akses.

Perangkap kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya investasi pendidikan anak merupakan fenomena yang dijelaskan secara teoritis oleh Bell dan

Gersbach (2001). Mereka mengembangkan model generasi tumpang tindih di mana keberadaan pekerja anak menghambat akumulasi modal manusia. Model ini menunjukkan bahwa suatu masyarakat dapat berada pada ekuilibrium ganda yaitu perangkap kemiskinan atau pertumbuhan berkelanjutan. Pada perangkap kemiskinan, anak-anak bekerja penuh waktu dan tidak ada investasi dalam pendidikan sehingga kemiskinan terus berlanjut. Pada ekuilibrium pertumbuhan, terjadi akumulasi modal manusia melalui kombinasi pengasuhan berkualitas dan pendidikan formal (Joshua, 2015). Transisi dari perangkap ke pertumbuhan memerlukan program pajak dan transfer yang dirancang dengan hati-hati. Keluarga miskin menghadapi kendala likuiditas yang parah sehingga mereka tidak dapat membiayai investasi pendidikan anak. Mereka juga memiliki tingkat diskonto yang tinggi karena ketidakpastian hidup dan kebutuhan bertahan hidup jangka pendek. Investasi dalam pendidikan anak yang hasilnya baru dirasakan 10 hingga 15 tahun kemudian terasa sangat berisiko. Ketika tingkat pengembalian pasar pinjaman sangat tinggi, meminjam untuk membiayai pendidikan menjadi tidak rasional secara finansial. Intervensi kebijakan seperti program transfer tunai bersyarat dapat mengubah insentif keluarga miskin untuk menyekolahkan anak.

Pengembalian ekonomi dari pendidikan bervariasi secara signifikan tergantung pada jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan konteks pasar kerja. Di negara berkembang, tingkat pengembalian tertinggi umumnya ditemukan pada pendidikan dasar karena biayanya rendah dan premium upah terhadap pekerja tidak terdidik cukup besar (Barouni & Broecke, 2014). Colclough (2012) melaporkan bahwa setiap tambahan satu tahun schooling di tingkat dasar dapat meningkatkan pendapatan antara 10 hingga 20 persen di negara berkembang. Pengembalian pendidikan menengah dan tinggi juga positif namun umumnya lebih rendah kecuali di negara dengan ketimpangan upah yang tinggi. Pengembalian pendidikan juga lebih tinggi bagi perempuan dibanding laki-laki di banyak negara berkembang. Hal ini terjadi karena perempuan tanpa pendidikan hampir tidak memiliki peluang di pasar kerja formal. Pendidikan membuka akses perempuan ke pekerjaan bergaji lebih baik dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga. Dampak pendidikan perempuan terhadap pengurangan kemiskinan juga bekerja melalui jalur antar generasi. Ibu yang berpendidikan memiliki anak dengan status gizi lebih baik, kesehatan lebih baik, dan pendidikan lebih tinggi. Efek multiplier ini membuat investasi dalam pendidikan perempuan memiliki pengembalian sosial yang sangat tinggi (Ackerman & Scott, 2017).

Distribusi manfaat pendidikan antar kelompok pendapatan tidak merata dan cenderung menguntungkan kelompok kaya di jenjang yang lebih tinggi (Pike, 2018). Lanjouw et al. (2001) menganalisis manfaat belanja publik pendidikan di Indonesia menggunakan data survei rumah tangga. Mereka menemukan bahwa kelompok miskin terwakili dengan baik di pendidikan dasar karena tingkat partisipasi yang tinggi. Namun di pendidikan menengah, anak dari

keluarga kaya memiliki tingkat partisipasi jauh lebih tinggi dibanding anak miskin. Belanja publik untuk pendidikan menengah dan tinggi cenderung dinikmati secara tidak proporsional oleh kelompok kaya. Subsidi pendidikan tinggi yang besar di banyak negara berkembang justru bersifat regresif karena sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga berada. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke pendidikan dasar dan menengah (Abdulhak & Darmawan, 2013). Peningkatan akses pendidikan menengah bagi anak miskin akan memberikan manfaat ganda yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan ketimpangan. Program beasiswa bersyarat yang ditargetkan pada anak miskin dengan prestasi baik dapat mengatasi kendala likuiditas. Pada saat yang sama, kualitas pendidikan di daerah miskin harus ditingkatkan agar anak benar benar memperoleh keterampilan yang bermanfaat (Darmawan, 2013).

Pendidikan memiliki dampak tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan melalui jalur kesehatan, fertilitas, dan pemberdayaan perempuan (Bueno & Morefield, 2017). Colclough (2012) menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan memiliki tingkat kematian anak yang lebih rendah dan status gizi anak yang lebih baik. Pengetahuan tentang kebersihan, sanitasi, dan gizi yang diperoleh di sekolah diterapkan dalam pengasuhan anak sehari-hari. Ibu berpendidikan juga cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit karena mereka menikah lebih lambat dan menggunakan kontrasepsi lebih efektif. Penurunan fertilitas ini mengurangi rasio ketergantungan dalam rumah tangga dan membebaskan sumber daya untuk investasi per anak. Di tingkat makro, transisi demografi akibat peningkatan pendidikan perempuan menciptakan bonus demografi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi (Darmawan, 2013). Pendidikan juga meningkatkan partisipasi politik dan tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah dari warga miskin. Masyarakat yang lebih terdidik lebih mampu menekan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas termasuk pendidikan dan kesehatan. Jalur jalur tidak langsung ini sering diabaikan dalam analisis biaya manfaat proyek pendidikan yang hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Padahal dampak kumulatif dari jalur tidak langsung dapat sama atau lebih besar dari dampak langsung terhadap pendapatan (Smith et al., 2016).

Keterbatasan kapasitas fiskal negara berkembang membatasi kemampuan pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara simultan (Fosu, 2007). Pemerintah di negara miskin menghadapi trade off antara membangun lebih banyak sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah yang sudah ada. Membangun sekolah baru diperlukan untuk menjangkau anak di daerah terpencil yang saat ini tidak bersekolah. Namun membangun sekolah baru tanpa memperhatikan kualitas hanya akan memperbanyak anak yang bersekolah tanpa belajar. Memperbaiki kualitas memerlukan investasi besar dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum,

dan penyediaan buku teks (Lockheed, 2012). Dua strategi ini memerlukan sumber daya yang berbeda dan mungkin tidak dapat dilakukan bersamaan dalam anggaran terbatas. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas di negara berkembang menyebabkan perluasan akses pendidikan sering menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pembelajaran secara merata (Schendel & McCowan, 2016). Colclough (2012) menunjukkan bahwa bantuan luar negeri untuk pendidikan sering tidak terkoordinasi dan tidak berkelanjutan. Proyek yang didanai donor mungkin berhenti ketika pendanaan habis karena pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkannya. Pendekatan kemitraan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sekolah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sekolah yang dikelola komunitas dengan partisipasi orang tua menunjukkan tingkat kehadiran guru dan siswa yang lebih baik. Namun pendekatan ini juga memiliki risiko memperdalam ketimpangan antar daerah karena kapasitas komunitas yang berbeda beda.

Pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan vokasi menjadi alternatif penting bagi anak miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Irwanto et al. (2001) dalam studi mereka tentang pendidikan alternatif di Indonesia mengidentifikasi berbagai program untuk pemuda kurang beruntung. Program program ini dikelola oleh institusi pemerintah dan organisasi swasta dengan pendekatan yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta. Pendidikan non formal memungkinkan anak yang putus sekolah untuk memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan di pasar kerja. Program ini dirancang secara proaktif dan memperhatikan kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja (Darmawan & Mardikaningsih, 2016). Program pelatihan vokasi biasanya berdurasi pendek dan berfokus pada keterampilan praktis seperti menjahit, perbengkelan, atau tata boga. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada adanya hubungan dengan dunia usaha yang bersedia menyerap lulusan. Magang di tempat kerja merupakan komponen penting yang menjembatani pelatihan dengan pekerjaan aktual. Sertifikasi kompetensi dari lembaga yang diakui meningkatkan nilai lulusan di mata pemberi kerja. Namun pendidikan non formal masih dipandang sebagai jalur kelas dua dibandingkan pendidikan formal oleh masyarakat. Lulusan pendidikan non formal mungkin menghadapi diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja meskipun memiliki keterampilan yang setara. Integrasi antara jalur formal dan non formal dalam sistem pendidikan nasional diperlukan untuk mengatasi stigma ini (Billett et al., 2014).

Dinamika hubungan pendidikan dan kemiskinan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan transformasi struktur ketenagakerjaan. Di negara berkembang yang mengalami industrialisasi, permintaan tenaga kerja terampil meningkat lebih cepat daripada penawaran (Relationship between Education and Poverty: A Case of India, 2017). Premium upah untuk pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkat selama fase awal industrialisasi.

Hal ini memberikan insentif yang lebih besar bagi keluarga miskin untuk berinvestasi dalam pendidikan anak. Namun di sisi lain, biaya pendidikan juga cenderung meningkat karena persaingan masuk ke sekolah berkualitas semakin ketat. Colclough (2012) mencatat bahwa privatisasi pendidikan di banyak negara berkembang memperdalam ketimpangan akses. Sekolah swasta berkualitas hanya dapat dijangkau oleh keluarga kaya sementara sekolah negeri kehilangan siswa terbaik. Fenomena ini menciptakan segregasi pendidikan berdasarkan status sosial ekonomi yang semakin tajam. Anak dari keluarga miskin yang bersekolah di negeri dengan kualitas buruk tidak dapat bersaing dengan anak kaya. Akibatnya mobilitas sosial antar generasi menurun dan kemiskinan struktural semakin mengakar. Intervensi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah negeri tetap menjadi pilihan yang layak bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas sekolah negeri secara merata di seluruh wilayah harus menjadi prioritas utama pemerintah. Tanpa itu, pendidikan tidak akan berfungsi sebagai mesin mobilitas sosial sebagaimana diharapkan.

PENUTUP

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan di negara berkembang bersifat dua arah dan kumulatif membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Kemiskinan mengurangi akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak sementara rendahnya pendidikan melanggengkan kemiskinan antar generasi. Kualitas pendidikan yang buruk di daerah miskin menjadi penghalang utama karena anak bersekolah namun tidak memperoleh keterampilan dasar. Perangkap kemiskinan dijelaskan oleh Bell dan Gersbach (2001) melalui model di mana pekerja anak menghambat akumulasi modal manusia. Pengembalian ekonomi pendidikan bervariasi menurut jenjang, jenis kelamin, dan konteks dengan pendidikan dasar memberikan manfaat paling besar bagi kelompok miskin. Distribusi belanja publik pendidikan yang bias terhadap jenjang tinggi memperdalam ketimpangan karena kelompok kaya lebih banyak menikmati subsidi. Jalur tidak langsung pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui kesehatan, fertilitas, dan pemberdayaan perempuan sama pentingnya. Keterbatasan fiskal negara berkembang memaksa pemerintah menghadapi trade off antara perluasan akses dan peningkatan kualitas. Pendidikan non formal menjadi alternatif penting bagi anak miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan formal namun masih dipandang sebagai jalur kelas dua.

Implikasi teoretis dari studi ini adalah perlunya model yang memperhitungkan kualitas pendidikan dan heterogenitas pengembalian dalam analisis hubungan pendidikan dan kemiskinan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model yang membedakan dampak pendidikan berdasarkan kualitas pembelajaran yang diterima. Bagi pemerintah negara berkembang, rekomendasi utama adalah mengalokasikan belanja publik pendidikan secara lebih progresif dengan prioritas pada pendidikan dasar dan menengah. Program transfer tunai bersyarat yang menargetkan anak miskin dapat mengatasi kendala likuiditas

yang menghalangi investasi pendidikan. Peningkatan kualitas guru melalui seleksi yang lebih ketat, pelatihan berkelanjutan, dan insentif berbasis kinerja sangat mendesak untuk dilakukan. Sistem akreditasi sekolah perlu diperkuat untuk mendorong perbaikan kualitas secara berkelanjutan terutama di daerah miskin. Program pendidikan non formal harus diintegrasikan ke dalam sistem nasional dengan jalur sertifikasi yang setara dengan pendidikan formal. Pemerintah perlu membangun data longitudinal yang melacak hasil pendidikan dan ketenagakerjaan untuk evaluasi kebijakan berbasis bukti. Kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan magang dan penyerapan lulusan pendidikan vokasi harus diperluas. Investasi dalam pendidikan anak usia dini memberikan pengembalian tertinggi karena mencegah terbentuknya kesenjangan sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I., & Darmawan, D. (2013). *Teknologi pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ackerman, X. S., & Scott, K. (2017). Gains and gaps in girls' education. *Compare*, 47(1), 133–136. <https://doi.org/10.1080/03057925.2016.1241392>
- Adhikary, M., & Kateja, A. (2012). Linkages between poverty and education: some empirical evidences. *International Journal of Indian Culture and Business Management*, 5(5), 575–592. <https://doi.org/10.1504/IJICBM.2012.048772>
- Arifin, S., & Al Hakim, Y. R. (2017). Perbandingan Pola Konsumsi Antara Rumah Tangga Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 63–74.
- Barouni, M., & Broecke, S. (2014). The Returns to Education in Africa: Some New Estimates. *Journal of Development Studies*, 50(12), 1593–1613. <https://doi.org/10.1080/00220388.2014.936394>
- Bell, C., & Gersbach, H. (2001). Child labor and the education of a society. IZA Discussion Paper No. 338. Institute for the Study of Labor.
- Billett, S. R., Bound, H., & Lin, M. (2014). Recognising and Certifying Workers' Knowledge: Policies, Frameworks and Practices in Prospect: Perspectives from Two Countries. 281–298. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8694-2_16
- Bourdillon, M., & Boyden, J. (2014). Introduction: Child Poverty and the Centrality of Schooling. 1–19. https://doi.org/10.1057/9781137404039_1
- Bueno, N., & Morefield, R. (2017). Empowerment of women and poverty reduction in developing countries. *Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines*, 2(2). <https://doi.org/10.21533/ISJSS.V2I2.80>
- Chin, G. (2015). Attacking the problem of extreme poverty. *Science*, 348(6236), 768–768. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.348.6236.768-Q>
- Colclough, C. (Ed.). (2012). *Education outcomes and poverty: A reassessment*. Routledge.

- Cremin, P., & Nakabugo, M. G. (2012). Education, development and poverty reduction: a literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 499–506.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks.
- Darham, C. M., & Araujo, L. (2016). Underdeveloped african education: The root of its poverty. 1–4. <https://doi.org/10.15354/SIE.16.RE008>
- Darmawan, D. (2013). Pengaruh konsep diri dan kecerdasan adversitas terhadap motivasi berprestasi dan intensi berwirausaha. *Metromedia*, Surabaya.
- Darmawan, D. (2013). Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Pena Semesta – PT. JePe Press Media Utama, Surabaya.
- Darmawan, D., & Mardikaningsih, R. (2016). Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi strategik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 71-84.
- Darmawan, D., Mardikaningsih, R., & Putra, A. R. (2013). Proses integrasi fungsi SDM dengan fungsi pemasaran, produksi, dan keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 32–42.
- Figueroa, A. (2015). Education and Human Capital Formation. 11–27. https://doi.org/10.1057/9781137506979_2
- Fosu, A. K. (2007). Fiscal Allocation for Education in Sub-Saharan Africa: Implications of the External Debt Service Constraint. *World Development*, 35(4), 702–713. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2006.06.008>
- Hariani, M., Mardikaningsih, R., & Sinambela, E. A. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Berbasis Identitas Lokal Serta Faktor-Faktor Keberlanjutannya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 15–24.
- Hutomo, S., Akhmal, D., Darmawan, D., & Yuliana, Y. (2012). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Addar Press, Jakarta.
- Irwanto, P., Hendriati, A., & Hestyanti, Y. R. (2001). Alternative education for disadvantaged youth in indonesia: strategies of education and training for disadvantaged groups. UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Jensen, R. T. (2010). The (Perceived) Returns to Education and the Demand for Schooling. *Quarterly Journal of Economics*, 125(2), 515–548.
- Joshua, J. (2015). The Accumulation of Human Capital as a Factor of Production. 26–50. https://doi.org/10.1057/9781137529367_3
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage Publications.
- Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, education, and health in Indonesia: Who benefits from public spending? Policy Research Working Paper No. 2739. World Bank.

- Lewin, K. M. (2009). Access to education in sub-Saharan Africa: patterns, problems and possibilities. *Comparative Education*, 45(2), 151–174.
- Lockheed, M. E. (2012). The Condition of Primary Education in Developing Countries. 28–48. <https://doi.org/10.4324/9780203816455-6>
- Mardikaningsih, R. (2015). Perempuan dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kegiatan Wirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 61–72.
- Mardikaningsih, R., & Darmawan, D. (2014). Strategi Kognitif Wirausahawan untuk Menghadapi Ketidakpastian Radikal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 63-74.
- Mardikaningsih, R., & Darmawan, D. (2016). Strategi Pengembangan Kompetensi Inti untuk Keunggulan Bersaing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 35–48.
- Mayer, S. E. (2010). The relationship between income inequality and inequality in schooling. *Theory and Research in Education*, 8(1), 5–20.
- Mbiti, I. (2016). The Need for Accountability in Education in Developing Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 30(3), 109–132.
- Pike, R. M. (2018). Economic Inequality and Accessibility to Higher Education. *Canadian Journal of Higher Education*, 4(2).
- Putra, A. R., Arifin, S., Mardikaningsih, R., & Hariani, M. (2016). Peran Karakteristik Kewirausahaan Dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 29-34.
- Putra, A. R., Darmawan, D., & Al Hakim, Y. R. (2014). Mekanisme Penciptaan dan Perlindungan Keahlian Inti untuk Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 37–50.
- Schendel, R., & McCowan, T. (2016). Expanding higher education systems in low-and middle-income countries: the challenges of equity and quality. *Higher education*, 72(4), 407-411.
- Sinambela, E. A., & Mauliyah, N. I. (2017). Sensitivitas Investasi Usaha Mikro Terhadap Perubahan Suku Bunga Kredit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 37–48.
- Smith, W. C., Ikoma, S., & Baker, D. P. (2016). Education, health, and labor force supply: Broadening human capital for national development in Malawi. *Cogent Education*, 3(1), 1149041.
- Wagner, D. A. (2010). Quality of education, comparability, and assessment choice in developing countries. *Compare*, 40(6), 741-760.
- Wisnujati, N. S. (2012). Kaji ulang kebijakan pemerintah dalam upaya pemenuhan 11 hak dasar penduduk miskin pada Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur Tahun 2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1-10.
- Yanti, Y., Yuliana, Y., Darmawan, D., & Sinambela, E. A. (2013). Psikologi pendidikan. Spektrum Nusa Press, Jakarta.